



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025).

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2026 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027;

2. Surat Bupati Sanggau Nomor 100.1.4.4/356/HK tanggal 28 September 2026 hal Penyampaian Propemperda Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027.

KETIGA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada tanggal 29 September 2026.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
: 10 TAHUN 2026
: 29 SEPTEMBER 2026
: PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2027

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/InstansiTerkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelas an/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	√	-	➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ➤ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	➤ BPKAD ➤ BAPPERIDA ➤ INSPEKTORAT ➤ Bagian Hukum ➤ Seluruh Perangkat Daerah	Tahun 2027	Sangat Penting
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	-	√	➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	-	-	➤ BPKAD ➤ BAPPERIDA ➤ Bagian Hukum ➤ Seluruh Perangkat Daerah	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ➤ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.					
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028	√	-	➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ➤ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	➤ BPKAD ➤ BAPPERIDA ➤ Bagian Hukum ➤ Seluruh Perangkat Daerah	Tahun 2027	Sangat Penting
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati	Pembentukan, besaran dan sumber penganggaran, penempatan dan	√	-	➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	-	√	➤ BPKAD ➤ BAPPERIDA ➤ BKBP ➤ INSPEKTORAT ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2029	pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2029.			➤ Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020; ➤ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.					
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Program Studi Di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri	Penambahan dukungan biaya penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak	-	√	➤ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ➤ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman	-	√	➤ Bagian Kesra ➤ BAPPEDA ➤ BPKAD ➤ INSPEKTORAT ➤ Bagian KPP ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pontianak Di Sanggau				Pengelolaan Keuangan Daerah.					
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2025-2029	-	√	➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; ➤ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka	-	√	➤ BAPPERIDA ➤ Bagian Hukum ➤ Seluruh Perangkat Daerah	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ➤ Intruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.					
7	Rancangan Peraturan Daerah	Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau	-	√	➤ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025	-	√	➤ DKPTPHP ➤ Bapperida ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.					
8	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Sampah	Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah, memastikan pengelolaan yang berwawasan lingkungan, dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah	√	-	➤ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; ➤ Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah; ➤ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan	√	-	➤ DLH ➤ BAPPERIDA ➤ DPMPTSP ➤ PERKIMTAN ➤ PEMDES ➤ DINKES ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pemerintah pengganti Undang Undang; ➤ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;					
9	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dibatasi pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai lalu lintas jalan tidak mencakup materi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan penyelenggaraan	√	-	➤ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,; ➤ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan memperhatikan penyesuaian	√	-	➤ DISHUB ➤ PUPR ➤ SATPOL PP ➤ BAPPEDA ➤ BAPPERIDA ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyiampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelas an/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan.			ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;					
10	Rancangan Peraturan Daerah	Ketertiban Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Ketertiban Umum perlu disesuaikan secara menyeluruh dengan perkembangan kewenangan pemerintahan daerah,	√	-	➤ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6); ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali	√	-	➤ SATPOL PP ➤ BAPPEDA ➤ BAPPERIDA ➤ DLH ➤ DISPERINDAGKO P DAN UM ➤ PUPR ➤ DPMPTSP ➤ DINSOS P3AKB ➤ DISHUB ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sistem hukum pidana nasional.			diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; ➤ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. ➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;					
11	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan sebagai dasar hukum	√	-	➤ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3);	√	-	➤ BMSDA ➤ BAPPERIDA ➤ DPMPTSP ➤ DLH ➤ Bagian Hukum	Tahun 2027	Sangat Penting

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyiampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelas an/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya air, mengisi kekosongan norma, memberikan kepastian hukum, serta memitigasi konflik pemanfaatan air dan risiko banjir maupun kekeringan.			➤ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; ➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.					

Ditetapkan di Sanggau.
 Pada tanggal 29 September 2026.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU
 WAKIL KETUA,
 ROBBY SUGIANTO